

ANALISIS DAMPAK TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA



DPR RI Periode 2019–2024 telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. RUU Perubahan Atas UU ASN telah ditetapkan menjadi prioritas program legislasi nasional (prolegnas) pada tahun 2020. Hal yang dijadikan dasar pertimbangan perubahan UU ASN yaitu *pertama*, diskriminasi terhadap pengaturan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). *Kedua*, Urgensi pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dimana UU ASN dinilai tidak menjelaskan pentingnya pembentukan lembaga nonstruktural KASN.

Kabupaten Bogor

- Diusulkan agar rekrutmen tenaga honorer direkrut menjadi PPPK dalam penerimaan ASN dengan cara diberikan alokasi 50% dari tenaga honorer dan 50% dari pelamar umum.
- Pemerintah Kabupaten Bogor meminta kepada Kementerian PAN-RB agar diperkenankan melaksanakan **seleksi mandiri**.

Pegawai Honorer



Kota Tangerang Selatan

- Kota Tangerang Selatan masih kekurangan lebih dari **6.000 ASN**.
- Saat ini Kota Tangerang Selatan masih mengandalkan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk mengisi kekosongan PNS.

Belum dapat dirasakan secara utuh oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, saat ini masih sebatas pada pengawasan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Tanggapan terhadap **fungsi KASN** saat ini



Perlu memperkuat dari sisi wewenang, penempatan dan pemilihan SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional.

Kesimpulan

- 1) Terhadap usulan untuk menghapuskan KASN, para informan melihat bahwa peran KASN belum dapat menciptakan sistem merit sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih terdapat persoalan kewenangan, SDM, dan anggaran.
- 2) Terhadap pengangkatan otomatis tenaga honorer baik sebagai PNS maupun PPPK berdasarkan analisis *cost and benefit* kedua pilihan memberikan manfaat seimbang. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi politik dalam mengambil keputusannya, karena ada keuntungan politik yang diterima oleh DPR dan ada keuntungan keadilan dan ekonomi bagi tenaga honorer.

Rekomendasi

- 1) Penghapusan KASN, apabila persoalan kewenangan, SDM, dan anggaran tidak mendapat dukungan perbaikan.
- 2) Isu pengangkatan tenaga honorer dapat dipertahankan dengan memperbaiki usulan dari pengangkatan sebagai PNS dengan menambahkan PPPK, mengingat bahwa ASN terdiri atas PNS dan PPPK.



Tim Peneliti: